



RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA

2023



SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono 43. Telp (0274) 540650 Faks (0274) 540651
setwan.jogjakota.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta sesuai Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kota Yogyakarta diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk Tahun 2023. Perumusan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 mengakomodir program-program yang ada di OPD, dengan demikian Sekretariat DPRD sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk tahun 2023 diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja OPD.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta memuat rencana Program dan Kegiatan untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023 dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta ini akan dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2023 yang selanjutnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.3. MAKSUD & TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kota Yogyakarta untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun kedepan sebagai implementasi visi dan misi Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

1.3.2. Tujuan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun dengan tujuan agar dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD berdasarkan pada dokumen perencanaan yang telah disusun dalam program dan kegiatan sehingga diharapkan fasilitasi yang dilaksanakan Sekretariat DPRD terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel. 4.1 Rencana Program dan Kegiatan

Bab V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA TAHUN LALU

**2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 DAN
CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Gambaran realisasi pelaksanaan rencana kerja program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun 2021. Tabel 2.1 dimaksud sebagai berikut.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2021

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Kepuasan Layanan Fasilitasi terhadap agenda DPRD	Indeks kepuasan layanan terhadap agenda DPRD	77 poin
---	--	--	---------

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Kuangan	Fisik	Kuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2021		Fisik	Kuangan	Fisik	Kuangan		
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat	Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat	A	27.818.463.703,00	BB	49.601.433.125,00	A	32.499.975.670,00	A	32.499.975.670,00	BB	29.973.422.188,86	0,00%	92,23%					Bagian Administrasi Umum	
			Persentase administasi dan keuangan DPRD yang diselesaikan	Jumlah layanan administrasi dan keuangan yang diselesaikan dibagi layanan administrasi dan keuangan yang disediakan dikali 100%	100,00 %	0,00	0,00 -	0,00	100,00 %	0,00	100	0,00	100	0,00	100,00%	0,00%					Bagian Adminitrasi Umum	
			Persentase rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan	Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan dibagi jumlah perencanaan rapat paripurna dikali 100%	100,00 %	0,00	0,00 -	0,00	100,00 %	0,00	100	0,00	100	0,00	100,00%	0,00%					Bagian Persidangan dan Perundang Undangan	
Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																						
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			14.605.500,00		9.563.400,00		6.838.000,00	100,00%	6.838.000,00	100,00%	6.825.000,00	100,00%	99,81%						Gabung beberapa sub kegiatan
			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		1 Berita Acara		1 Berita Acara		1 Berita Acara		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			15.001.000,00		9.563.400,00		3.190.000,00	100,00%	3.190.000,00	100,00%	3.168.000,00	100,00%	99,31%						Realisasi 2020 abung beberapa sub kegiatan
			RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			77.728.944,00		9.563.400,00		95.207.194,00	100,00%	95.207.194,00	100,00%	94.405.976,97	100,00%	99,16%						Gabung beberapa sub kegiatan
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I,II,III dan IV		6 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen Evaluasi		1		1		1		100,00%		100,00%		100,00%							

		12	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			1.684.722.192,00		5.037.114.247,00		1.062.146.380,00	100,00%	1.062.146.380,00	100,00%	785.787.616,43	100,00%	73,98%					Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		12 laporan		12 laporan		11 laporan		100,00%		100,00%		100,00%						
		13	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			1.684.722.192,00		5.037.114.247,00		1.033.531.380,00	100,00%	1.033.531.380,00	100,00%	780.344.298,88	100,00%	75,50%					Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		12 laporan		12 laporan		11 laporan		100,00%		100,00%		100,00%						
		14	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			1.684.722.192,00		5.037.114.247,00		1.021.191.380,00	100,00%	1.021.191.380,00	100,00%	776.874.643,03	100,00%	76,08%					Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		12 laporan		12 laporan		11 laporan		100,00%		100,00%		100,00%						
		15	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan			583.525.000,00		5.037.114.247,00		217.155.000,00	100,00%	217.155.000,00	100,00%	213.173.500,00	100,00%	98,17%					Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK		1 laporan		1 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%						
		16	Pengawasan Penggunaan Anggaran			4.199.800.000,00		5.037.114.247,00		2.301.625.000,00	100,00%	2.301.625.000,00	38,50%	555.422.891,00	38,50%	24,13%					Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
			Pengawasan Mitra Kerja		160 laporan		43 laporan		135 laporan		100,00%		85,93%		85,93%						
			Pembentukan Panitia Khusus DPRD		0 keputusan		0 keputusan		4 keputusan		100,00%		0,00%		0,00%						
		17	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah			589.085.000,00		5.037.114.247,00		195.775.000,00	100,00%	195.775.000,00	100,00%	179.114.920,00	100,00%	91,49%					Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
			LKPJ Walikota Yogyakarta Tahun 2020		1 Keputusan DPRD		1 Keputusan DPRD		1 Keputusan DPRD		100,00%		100,00%		100,00%						
		Peningkatan Kapasitas DPRD																			
		18	Bimbingan Teknis DPRD			4.735.600.000,00		5.037.114.247,00		2.036.420.000,00	100,00%	2.036.420.000,00	100,00%	1.730.968.907,00	100,00%	85,00%					Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
			Pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD		8 kali		6 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
		19	Publikasi dan Dokumentasi Dewan			1.385.994.000,00		1.297.932.982,00		1.462.994.000,00	100,03%	1.462.994.000,00	100,03%	1.423.242.500,00	100,00%	97,28%					Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
			Baliho yang terpasang		2 Baliho		0 Baliho		2 Baliho		100,00%		100,00%		100,00%						
			Frekuensi Suara Dewan		12 Kali		12 Kali		12 Kali		100,00%		100,00%		100,00%						
			Jumlah Advertorial		14 Kali		14 Kali		14 Kali		100,00%		100,00%		100,00%						
			Jumlah Greeting di televisi / Radio		5 Kali		3 Kali		5 Kali		100,00%		100,00%		100,00%						
			Jumlah Liputan		27 Kali		5 Kali		27 Kali		100,00%		100,00%		100,00%						

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Dalam tahapan pembahasan raperda juga dipengaruhi faktor eksternal yaitu perlunya konsultasi, fasilitasi dan evaluasi dari Gubernur; 2. Seringkali terjadi kegiatan DPRD tidak dapat terlaksana, disamping itu kondisi pandemi covid 19 juga mempengaruhi agenda pembahasan yang sudah terjadwal tidak dapat terlaksana; 3. Dengan adanya perubahan sistem aplikasi SIPD menyebabkan SDM yang ada belum semuanya siap mengaplikasikan; 4. Sistem aplikasi SIPD belum sempurna, sehingga terkait penatausahaan masih menggunakan aplikasi SIPKD
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Dalam menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan (menyusun tatakala/ploting baik target keuangan dan target fisik) pada tahun berikutnya agar benar-benar dipertimbangkan dengan melihat tren isu dan realisasi pada n-1 dan ada perencanaan antisipasi/strategi apabila realisasi kegiatan tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan.
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; padding: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p data-bbox="1784 217 1857 233">Yogyakarta,</p> <p data-bbox="1857 237 2072 280">Disusun oleh Sekretaris SEKRETARIAT DPRD</p> <p data-bbox="1876 358 2053 396">Basuki Hari Saksono, SH. NIP. 196411111990031013</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p data-bbox="2107 217 2153 233">2022</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p data-bbox="2225 217 2298 233">Yogyakarta,</p> <p data-bbox="2252 237 2583 289">Dievaluasi oleh Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</p> <p data-bbox="2327 358 2505 396">Agus Tri Haryono, ST, MT NIP. 197203061996031004</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p data-bbox="2575 217 2618 233">2022</p> </div> </div>	

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2021 tercantum pada Tabel 2.2. Untuk indikator sasaran : Indeks kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD pada tahun 2022 dengan target skor 78.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD
Kota Yogyakarta

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Indikator Sasaran :												
1	Meningkatnya kepuasan layanan Fasilitasi terhadap agenda DPRD			78	78.2	78.5	78.7	78.9	78.10	78.14	78	78.2	
2	Meningkatnya reformasi birokrasi Sekretariat DPRD			50	55	60	65	70	-	32.22	50	55	
	Indikator Program :												
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD												
1.1	Persentase produk hukum yang diselesaikan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.2	Persentase pembahasan penganggaran yang diselesaikan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.3	Persentase kepesertaan bimtek anggota Dewan			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
1.4	Persentase administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPRD dan kelompok pakar yang diselesaikan			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota												
2.1	Persentase rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
2.2	Persentase administasi dan keuangan DPRD yang diselesaikan			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	

Secara umum Pencapaian Program dan Kegiatan di Tahun 2021 dapat diketahui bahwa di level Sasaran diketahui meningkat. Indikator Sasaran Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta adalah skor Indeks Kepuasan Layanan Fasilitasi terhadap Anggota DPRD. Pada Tahun 2021 skor IKM Sekretariat DPRD diketahui adalah 78,14. Skor tersebut meningkat jika dibandingkan dengan skor IKM pada Tahun 2020 yaitu 78.10. Pencapaian Skor IKM pada Tahun 2021 telah melampaui target yang ditetapkan yaitu skor 77.

Dari 2 program yang ada di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta di Tahun 2021, terdapat 2 program yang pencapaian kinerja mencapai 100% yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dapat terlihat bahwa dari sub kegiatan yang ada, pencapaian tertinggi ada pada 2 sub kegiatan yaitu sub kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100% dan sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%. Sedangkan pencapaian realisasi fisik terendah ada pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat realisasi fisik 75,29% dan realisasi keuangan 72,52%. Ini dikarenakan pencapaian output dan keuangan yang tidak maksimal baik output pengiriman dokumen maupun output materai.

Pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD rata - rata pencapaian realisasi fisik 96,26% dan realisasi keuangan 65,28%. Adapun pencapaian kegiatan dan sub kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terdiri dari 4 sub kegiatan yang pencapaian realisasi output kegiatan / sub kegiatan ini sangat tergantung dengan agenda kegiatan DPRD dan output yang dihasilkan oleh DPRD, beberapa materi rapat digabung dibahas dalam satu rapat. Capaian realisasi fisik untuk kegiatan / sub kegiatan ini adalah 100%, tetapi untuk capaian realisasi keuangan tertinggi pada sub kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang Undangan yaitu 87,74%, dan capaian realisasi keuangan terendah pada sub kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah yaitu 29,23%. Capaian realisasi keuangan rendah hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan agenda Dewan dan terkendala adanya pembatasan sosial dari pemerintah pusat karena adanya Pandemi Covid 19.

- Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran terdiri dari 6 sub kegiatan. Capaian realisasi fisik kegiatan / sub kegiatan ini adalah 100%, tetapi untuk capaian realisasi keuangan tertinggi pada sub kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD yaitu 98,74%, dan capaian realisasi keuangan terendah pada sub kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS. Hal ini dikarenakan realisasi keuangan pada beberapa komponen belanja yaitu :
 1. Menyesuaikan belanja makan minum agenda rapat Dewan;
 2. Waktu yang terbatas sehingga pembahasan di beberapa sub kegiatan digabung dalam satu rapat;
 3. Belanja perjalanan dinas luar daerah terdapat efisiensi komponen transportasi, dalam perencanaan anggaran menggunakan moda transportasi utama dengan pesawat udara, namun dalam realisasinya menggunakan transportasi darat. Hal ini dikarenakan adanya pandemi covid 19 yang membuat beberapa daerah menutup dan membatasi sementara tamu yang berkunjung, sehingga alat kelengkapan DPRD memilih daerah tujuan kunjungan kerja yang bisa dijangkau dengan menggunakan transportasi darat. Disamping itu juga menyesuaikan penjadwalan yang di bahas dalam rapat Badan Musyawarah.
- Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terdiri dari 7 sub kegiatan. Ada 6 sub kegiatan yang capaian realisasi fisik 100%, dan satu sub kegiatan yang capaian realisasi fisiknya rendah yaitu 38,50%. Rendahnya capaian realisasi fisik pada sub kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran dikarenakan 2 output yaitu Pengawasan Mitra Kerja yang ditargetkan 135 laporan terealisasi 116 laporan dikarenakan menyesuaikan permohonan pendampingan dari OPD mitra kerja, dan output Pembentukan Panitia Khusus DPRD yang ditargetkan 4 keputusan tidak terealisasi dikarenakan tidak adanya pembentukan pansus. Untuk capaian realisasi keuangan tertinggi pada sub kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yaitu 98,17%, dan capaian realisasi keuangan terendah pada sub kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran, dikarenakan pada komponen perjalanan dinas menyesuaikan permohonan pendampingan dari mitra OPD dan tidak adanya pembentukan panitia khusus DPRD, selain itu ada beberapa komponen belanja di efisiensi salah satunya jamuan makanan dan minuman rapat alat kelengkapan yang menggunakan zoom meeting.
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD terdiri dari 6 sub kegiatan, dan capaian realisasi fisik untuk 6 sub kegiatan tersebut yaitu 100%. Untuk capaian

realisasi keuangan tertinggi pada sub kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan yaitu 97,29%, dan capaian realisasi keuangan terendah pada sub kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli yaitu 6,25%. Hal ini dikarenakan menyesuaikan agenda DPRD.

- Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terdiri dari 2 sub kegiatan. Capaian realisasi fisik tertinggi pada sub kegiatan Pelaksanaan Reses yaitu 100%, dan capaian realisasi fisik terendah pada sub kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yaitu 97,15%. Untuk capaian realisasi keuangan tertinggi pada sub kegiatan Pelaksanaan Reses yaitu 83,20%, dan capaian realisasi keuangan terendah pada sub kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yaitu 73,04%. Hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan jumlah peserta audiensi yang hadir ke DPRD sehingga ada perbedaan jumlah peserta yang hadir ditiap pelaksanaan audiensi.
- Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD terdiri dari 2 sub kegiatan, dan capaian realisasi fisik untuk 2 sub kegiatan tersebut yaitu 100%. Untuk capaian realisasi keuangan pada 2 sub kegiatan ini rendah rata-rata 24,26%. Hal ini dikarenakan menyesuaikan penjadwalan alat kelengkapan di Badan Musyawarah serta sesuai kebutuhan baik frekuensi rapat maupun akomodasi perjalanan dinas.
- Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan. Capaian realisasi fisik dan keuangan tertinggi pada sub kegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi yaitu 100%, dan capaian realisasi keuangan 87,07%, Untuk capaian realisasi fisik dan keuangan terendah pada sub kegiatan Fasilitasi Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah yaitu 45%, dan capaian realisasi keuangan 33,79%. Hal ini dikarenakan pada komponen perjalanan dinas dalam rangka kerjasama tidak ada sehingga di delete pada anggaran perubahan, dan untuk komponen makan dan minum rapat menyesuaikan dengan ada tidaknya rencana kerjasama daerah yang akan dibahas di DPRD.
- Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD terdiri dari 4 sub kegiatan. Ada 2 sub kegiatan yang capaian realisasi fisiknya 100% yaitu sub kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD dan sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah. Untuk capaian realisasi keuangan tertinggi ada pada sub kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD yaitu 82,04%, dan capaian realisasi keuangan terendah ada pada sub kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD yaitu 29,25%. Hal ini dikarenakan pada komponen belanja narasumber tidak terealisasi.

Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program / kegiatan adalah :

- a. Efisiensi penggunaan anggaran dan hasil negosiasi melalui proses pengadaan barang dan jasa.
- b. Pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD dan fasilitasi yang dilaksanakan sangat tergantung dengan agenda Pimpinan dan Anggota Dewan serta Alat Kelengkapan.
- c. Dinamika kegiatan Dewan yang sangat dinamis sehingga seringkali terjadi perubahan agenda kegiatan Dewan sewaktu-waktu.
- d. Dinamika politik yang berkembang di DPRD sulit diprediksi secara pasti.
- e. Kesibukan dalam pembahasan anggaran dan Peraturan Daerah menyebabkan beberapa jadwal kegiatan Dewan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan sehingga berakibat pada tidak terserapnya anggaran.
- f. Beberapa target kinerja kegiatan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan riil yang berkembang.
- g. Adanya pandemi covid 19 yang menyebabkan beberapa kegiatan Dewan tidak dapat terlaksana.

Dalam perjalanan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta tentu saja ada kendala yang dihadapi, namun beberapa upaya telah dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang ada yaitu dengan :

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pelatihan, bimbingan teknis dan konsultasi;
- b. Hasil penjadwalan Badan Musyawarah disosialisasikan ke semua Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD;
- c. Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Memperbarui dan meningkatkan sarana prasarana pendukung secara kualitas sehingga mendukung kondusifitas kerja DPRD Kota Yogyakarta.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas, untuk perencanaan kegiatan dan anggaran kedepannya diusahakan memperhatikan baik realisasi keuangan maupun hasil yang dicapai di tahun tahun sebelumnya. Hanya saja kesulitan di Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan kegiatan sangat tergantung dengan Dewan sehingga ada beberapa kegiatan yang telah direncanakan sesuai tata kala tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

2.3.1 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyikapi tuntutan atas perkembangan dan kompleksitas beban kerja dalam memfasilitasi kegiatan DPRD, Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta berupaya dengan maksimal untuk mengawal Visi dan Misi kepala Daerah.

Adapun Visi Kepala Daerah Kota Yogyakarta adalah :

“KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN BERKUALITAS, PARIWISATA BERBASIS BUDAYA dan PUSAT PELAYANAN JASA, YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN.”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan.
2. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan.
3. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa.
4. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan.
5. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya.
6. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum.
7. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai.
8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas.
9. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat.

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat DPRD adalah :
“Meningkatkan kualitas layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD”.

Tujuan ini akan dilaksanakan dengan upaya :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi dan teknis kepada DPRD.
2. Mengembangkan SDM aparatur dan sistem administrasi secara menyeluruh.
3. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana penunjang kerja.
4. Optimalisasi koordinasi antar organisasi di Pemerintah Kota Yogyakarta.

Adapun Sasaran yang akan dicapai : **“Kepuasan Layanan Fasilitasi terhadap agenda DPRD meningkat”.**

Untuk mewujudkan sasaran ini dilakukan dengan upaya :

1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepada DPRD.
2. Peningkatan SDM Aparatur dan sistem administrasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana & sarana penunjang kerja.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kelembagaan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta mengalami perubahan sehingga dalam melaksanakan tugas pokoknya dibagi menjadi 3 (tiga) Bagian yaitu :

1. Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian program tugas pembantuan di bidang administrasi umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
2. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian program tugas pembantuan di bidang persidangan dan perundang-undangan.
3. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penganggaran dan pengawasan, serta kerjasama dan penyerapan aspirasi kepada DPRD.

Dukungan sumber daya manusia yang ada di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2022 berjumlah 45 orang pegawai. Berikut gambaran struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2021.

1. 1 (satu) orang Sekretaris DPRD
2. 3 (tiga) orang Kepala Bagian dan 9 orang Kepala Sub. Bagian
 - Kepala Bagian Administrasi Umum , terbagi dalam 3 sub bagian dan sub koordinator :
 - a. Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Ka. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
 - Kepala Bagian Persidangan dan Perundang Undangan, terbagi dalam 3 sub koordinator :
 - a. Sub Koordinator Kelompok Substansi Kajian Perundang Undangan
 - b. Sub Koordinator Kelompok Substansi Persidangan dan Risalah
 - c. Sub Koordinator Kelompok Substansi Humas Protokol dan Publikasi
 - Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan terbagi dalam 3 sub koordinator :
 - a. Sub Koordinator Kelompok Substansi Fasilitasi Penganggaran
 - b. Sub Koordinator Kelompok Substansi Fasilitasi Pengawasan
 - c. Sub Koordinator Kelompok Substansi Kerjasama dan Aspirasi
3. Staf PNS berjumlah 39 orang
4. Staf Tenaga Bantuan berjumlah 6 orang staf sebagai Tenaga Bantu (Naban)

Selain pegawai baik PNS maupun Tenaga Bantuan, Sekretariat DPRD juga didukung sumber daya manusia antara lain :

- a. Tenaga Ahli Fraksi
- b. Tenaga Teknis
- c. Tenaga Outsourcing (Cleaning Service, Security dan Front Office)
- d. Tenaga Sekretariat Fraksi

Selain didukung sumberdaya manusia, juga didukung dengan sarana dan prasarana yang meliputi :

- a. Bangunan Gedung
Sekretariat DPRD menempati bangunan yang lokasinya menyatu dengan gedung DPRD Kota Yogyakarta dengan lokasi di Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 43 Yogyakarta.

1. Gedung Sekretariat DPRD
2. Gedung DPRD

Gedung DPRD dengan luas bangunan ±1170 m², terdiri dari tiga lantai terdiri dari beberapa ruang antara lain :

- Lantai 1
 - Ruang Lobby
 - Ruang Rapat I (untuk RDPU dan Penerimaan Tamu)
 - Ruang Rapat II (untuk Banggar dan Banmus)
 - Ruang Fraksi
 - Tempat Parkir
 - Ruang Satpam
 - WC/Urinoir
- Lantai 2
 - Ruang Operator
 - Ruang Pimpinan (Ketua, Wakil Ketua I, dan Wakil Ketua II)
 - Ruang Alat Kelengkapan DPRD (Komisi, BK, Bapemperda)
 - Ruang Rapat Pimpinan
 - Ruang Rapat III (untuk DPRD dan Setwan)
 - Ruang Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
 - Mushola
 - WC/UrinoirDPRD
- Lantai 3
 - Ruang Rapat Paripurna
 - Ruang Bagian Administrasi Umum
 - Ruang Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
 - WC/Urinoir

b. Sarana Komunikasi dan Transportasi

1. Kendaraan bermotor

Kendaraan bermotor di Sekretariat DPRD per 1 Januari 2022 terbagi Kendaraan Sekretariat DPRD yang terdiri dari kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat serta Kendaraan roda empat jabatan bagi pimpinan DPRD :

- Kendaraan roda empat : 16 unit
- Kendaraan roda dua : 14 unit

2. Sarana Komunikasi

Laptop, komputer, LCD, Sound, AC, Fax, jaringan internet, dll.

3. Sarana Pendukung Lainnya

Genset, CCTV, Televisi, APAR, Pompa Hydrant, dll

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, masih menjumpai beberapa hambatan / kendala yaitu :

a. Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang ada di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

b. Ketugasan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta adalah memfasilitasi / mendukung tugas dan fungsi DPRD, sehingga dalam pencapaian target dan kinerja tergantung dari pelaksanaan rencana kerja DPRD sebagaimana yang telah di tetapkan.

c. Munculnya peraturan-peraturan baru sehingga harus dilakukan penyesuaian.

2.3.3 Tantangan dan Peluang

Tantangan dan peluang yang dihadapi Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah berikut :

a. Tantangan

1. Dinamika kegiatan Dewan yang begitu dinamis.
2. Profesionalisme, integritas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD.

b. Peluang

1. Adanya upaya peningkatan kapasitas Sumberdaya manusia di Sekretariat DPRD.
2. Ketepatan dan kepastian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penjadwalan yang telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah.
3. Partisipasi masyarakat yang cukup baik terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dewan.
4. Publikasi kegiatan DPRD melalui media sosial.

2.3.4 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Dalam uraian ini akan disampaikan mengenai rekomendasi dan kebijakan strategis yang akan ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Rekomendasi

Meningkatkan profesionalisme, integritas dan kapabilitas Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta. Peningkatan tersebut diartikan sebagai peningkatan fungsi, peran dan kontribusi operasional Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta untuk mencapai tujuan DPRD Kota Yogyakarta.

b. Kebijakan Strategis

1. Efektifitas organisasi dan manajemen dengan optimalisasi tata kerja dan tata kelola;
2. Meningkatkan kualitas dan fungsi aparatur melalui kompetensi pengetahuan dan keahlian;
3. Menyempurnakan sistem dan metode (tata laksana) operasional organisasi;
4. Pembaruan sarana dan prasarana penunjang operasional;
5. Penambahan daya dukung finansial dan non finansial;
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pendidikan pelatihan dan studi banding serta konsultasi;
7. Hasil penjadwalan Badan Musyawarah disosialisasikan ke semua Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD;
8. Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Perlu mewujudkan konsistensi pelaksanaan dan perencanaan kegiatan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKP

2.4.1. Membandingkan rancangan awal RKP dengan analisa kebutuhan

Dalam Rancangan Akhir RKP Tahun 2023

Sekretariat DPRD didukung dengan 2 program, 18 kegiatan dan 75 sub kegiatan dengan anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 81.501.866.143,-. Secara detil dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Akhir RKP Tahun 2023
Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DPRD

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Sekretariat DPRD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	12,816,156,031	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Sekretariat DPRD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	12,442,407,409	
			Persentase rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan	100 %	454,676,632			Persentase rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan	100 %	400,634,386	
			Persentase administrasi dan keuangan DPRD yang diselesaikan	100 %	22,074,507,308			Persentase administrasi dan keuangan DPRD yang diselesaikan	100 %	22,074,507,308	
2.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD	Persentase produk hukum yang diselesaikan	100 %	20,405,936,748	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Sekretariat DPRD	Persentase produk hukum yang diselesaikan	100 %	19,264,500,175	
			Persentase pembahasan penganggaran yang diselesaikan	100 %	23,639,042,584			Persentase pembahasan penganggaran yang diselesaikan	100 %	22,852,890,465	
			Persentase kepesertaan bimtek anggota Dewan	100 %	4,194,560,000			Persentase kepesertaan bimtek anggota Dewan	100 %	4,025,120,000	
			Persentase administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPRD dan kelompok pakar yang diselesaikan	100 %	549,806,400			Persentase administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPRD dan kelompok pakar yang diselesaikan	100 %	441,806,400	
					84,134,685,703					81,501,866,143	

Adapun Pembagian Program dan Kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD 2023 yang disampaikan dalam Surat Walikota tentang Penyusunan RKPD dan Renja OPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- 3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 6) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- 5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD;
- 7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
- 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
- 3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;
- 4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
- 5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
- 6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.

- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan :
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan :
 - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- i. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - Sub Kegiatan :
 - 1) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
 - 2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;
 - 3) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.
- j. Layanan Administrasi DPRD
 - Sub Kegiatan :
 - 1) Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD;
 - 2) Fasilitasi Fraksi DPRD;
 - 3) Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD;
 - 4) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD.

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Kegiatan :

a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- 2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- 3) Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan;
- 4) Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik;

b. Pembahasan Kebijakan Anggaran

Sub Kegiatan :

- 1) Pembahasan KUA dan PPAS;
- 2) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
- 3) Pembahasan APBD;
- 4) Pembahasan APBD Perubahan;
- 5) Pembahasan Laporan Semester;
- 6) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.

c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Sub Kegiatan :

- 1) Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum;
- 2) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;
- 3) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- 4) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian;
- 5) Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- 6) Pengawasan Penggunaan Anggaran;
- 7) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

d. Peningkatan Kapasitas DPRD

Sub Kegiatan :

- 1) Pendalaman Tugas DPRD;
- 2) Publikasi dan Dokumentasi Dewan;
- 3) Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli;
- 4) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;
- 5) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat;
- 6) Penyusunan Program Kerja DPRD.

- e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
Sub Kegiatan :
 - 1) Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
 - 2) Pelaksanaan Reses.
- f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
Sub Kegiatan :
 - 1) Penyusunan Kode Etik DPRD;
 - 2) Pengawasan Kode Etik DPRD.
- g. Pembahasan Kerja Sama Daerah
Sub Kegiatan :
 - 1) Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah;
 - 2) Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi.
- h. Fasilitasi Tugas DPRD
Sub Kegiatan :
 - 1) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
 - 2) Penyusunan Laporan Kinerja DPRD;
 - 3) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah;
 - 4) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.

2.4.2. Alasan proses tersebut dilakukan

Diharapkan Sekretariat DPRD dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 tetap mendasarkan usulan dari semua unsur Alat Kelengkapan DPRD yang nantinya tertuang dalam Rencana Kerja DPRD, disamping tetap memperhatikan realisasi tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi.

2.4.3. Temuan setelah proses

Dalam proses penyusunan rencana kerja Sekretariat DPRD mengakomodir usulan dari Alat Kelengkapan DPRD yang masuk, namun kenyataannya rencana kerja DPRD belum ditetapkan, sehingga setelah ditata dalam program dan kegiatan, pagu yang ditetapkan dalam rancangan awal RKPD belum mencukupi.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pada tahun 2023 tidak ada usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan untuk Sekretariat DPRD seperti dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4

**Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kota Yogyakarta**

OPD : Sekretariat DPRD

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Arah dan kebijakan makro tahun 2023 adalah mengangkat tema ***“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan “*** dengan fokus :

1. Pembangunan Sumber Daya (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja; Kedua Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Disamping arah dan kebijakan makro, untuk RKP tahun 2023 dengan tema tersebut dijabarkan ke dalam prioritas nasional sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi dan untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, pertahanan, dan transformasi pelayanan publik.

Selain memperhatikan tema pembangunan nasional juga perlu memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2023, yaitu “ ***Meningkatkan Daya Saing SDM dan Sektor Ekonomi Unggulan*** ”. Tema tersebut dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut :

1. Pengurangan Gap Ketimpangan Wilayah;
2. Penurunan Kemiskinan;
3. Pemulihan Ekonomi;
4. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan, Budaya);
5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik;
6. Menjaga Daya Dukung Lingkungan.

Sejalan dan mempertimbangkan prioritas pembangunan nasional dan pembangunan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat – daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing daerah kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan;
3. Peningkatan Perekonomian;
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi.

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing – masing prioritas daerah kota Yogyakarta adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Infrastruktur Wilayah;
11. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat.

Lebih lanjut prioritas tersebut di atas diterjemahkan ke dalam sasaran pembangunan di Kota Yogyakarta, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2023

No	Sasaran Pembangunan Daerah	IndikatorSasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata lama sekolah	11,73
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,70
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,20 – 5,40
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,61 – 7,57
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	54,66
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	68
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	530
		Jumlah Pelanggaran Perda	4,185
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	89,82
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,77

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA

3.2.1. Tujuan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD 2023 disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta untuk Tahun 2023 agar dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dapat berjalan dengan lancar sesuai Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

3.2.2. Sasaran

Sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat DPRD dalam rangka fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kota Yogyakarta harus dapat mewujudkan peningkatan kualitas dukungan administrasi, sarana prasarana, keuangan, persidangan, perundangan, penyerapan aspirasi, perumusan kebijakan dan kehumasan.

Dalam rangka peningkatan fungsi fasilitasi tersebut, Sekretariat DPRD berupaya meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar Program-program dan Kegiatan-kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan ketugasan DPRD Kota Yogyakarta.

Sasaran yang hendak dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah terwujudnya kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung penyelesaian agenda DPRD.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3.1. Faktor Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan, tugas dan wewenang DPRD Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas dukungan administrasi, sarana prasarana, keuangan, persidangan, perundangan, penyerapan aspirasi, perumusan kebijakan dan kehumasan sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut perlu dukungan Program dan Kegiatan yang disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

3.3.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Dalam penyusunan Renja 2023 ini terbagi dalam 2 (dua) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 75 (tujuh puluh lima) sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 sebesar Rp. 81.501.866.143,- (Delapan puluh satu milyar lima ratus satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh tiga rupiah). Sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta.

Pembagian Program dan Kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD 2023 yang disampaikan dalam Surat Walikota tentang Penyusunan RKPD dan Renja OPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- 3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 6) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- 5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD;
- 7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
- 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
- 3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;

- 4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - 5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - 6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan :
- 1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan :
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan :
- 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- i. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
- Sub Kegiatan :
- 1) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
 - 2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;
 - 3) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.

j. Layanan Administrasi DPRD

Sub Kegiatan :

- 1) Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD;
- 2) Fasilitasi Fraksi DPRD;
- 3) Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD;
- 4) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD.

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Kegiatan :

a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- 2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- 3) Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan;
- 4) Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik;

b. Pembahasan Kebijakan Anggaran

Sub Kegiatan :

- 1) Pembahasan KUA dan PPAS;
- 2) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
- 3) Pembahasan APBD;
- 4) Pembahasan APBD Perubahan;
- 5) Pembahasan Laporan Semester;
- 6) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.

c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Sub Kegiatan :

- 1) Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum;
- 2) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;
- 3) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- 4) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian;
- 5) Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- 6) Pengawasan Penggunaan Anggaran;
- 7) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

- d. Peningkatan Kapasitas DPRD
 - Sub Kegiatan :
 - 1) Pendalaman Tugas DPRD;
 - 2) Publikasi dan Dokumentasi Dewan;
 - 3) Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli;
 - 4) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;
 - 5) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat;
 - 6) Penyusunan Program Kerja DPRD.
- e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - Sub Kegiatan :
 - 1) Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
 - 2) Pelaksanaan Reses.
- f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 - Sub Kegiatan :
 - 1) Penyusunan Kode Etik DPRD;
 - 2) Pengawasan Kode Etik DPRD.
- g. Pembahasan Kerja Sama Daerah
 - Sub Kegiatan :
 - 1) Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah;
 - 2) Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi.
- h. Fasilitasi Tugas DPRD
 - Sub Kegiatan :
 - 1) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
 - 2) Penyusunan Laporan Kinerja DPRD;
 - 3) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah;
 - 4) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.

3.3.3. Kesesuaian Program dan Kegiatan dengan RKPD

Program dan kegiatan yang direncanakan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta untuk Tahun 2023 didasarkan pada Rencana Kerja DPRD yang diusulkan oleh seluruh Alat Kelengkapan DPRD dan ditetapkan dalam Rencana Kerja DPRD. Berdasarkan pada hal tersebut, pagu anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2023 menyesuaikan dengan hasil Rencana Kerja DPRD.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2023

4.1 Tabel Rencana Program dan Kegiatan

Sekretariat DPRD dalam mewujudkan Sasaran OPD yakni Meningkatnya Kepuasan Layanan Fasilitasi terhadap Agenda DPRD dengan Indikator Indeks Kepuasan Layanan Fasilitasi terhadap Agenda DPRD.

Sekretariat DPRD memiliki 2 (dua) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 75 (tujuh puluh lima) sub kegiatan. Kedua Program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Adapun Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.1. sebagai berikut.

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	02						81,501,866,143						84,134,685,703						
4	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat DPRD Persentase Administasi dan Keuangan DPRD yang Diselesaikan Persentase Rapat Paripurna DPRD yang Dilaksanakan	A Nilai 100 % 100 %	0 Nilai 0 % 0 %	A Nilai 100 % 100 %	34,917,549,103				A Nilai 100 % 100 %	35,345,339,971			
4	02	01	2.01			Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pengangan dan evaluasi kinerja pada Sekretariat DPRD selesai	33 Dokumen	0 Dokumen	33 Dokumen	101,278,800				33 Dokumen	100,401,580			
4	02	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4 Dokumen	11,323,072	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	4 Dokumen	11,288,572	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	5,722,500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	5,426,260	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	5,722,500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	5,426,260	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	4,292,786	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	4,209,066	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	4,292,786	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	4,209,066	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			24 Laporan	67,605,156	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	24 Laporan	67,522,356	Sekretariat DPRD

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2,320,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Laporan	2,320,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan pada Sekretariat DPRD selesai	23 Laporan		0 Laporan	42 Laporan	5,215,411,088						42 Laporan	5,554,446,990	
4 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	5,198,711,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	43 Orang/bulan	5,537,792,902	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	4,500,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	3 Dokumen	4,500,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	3,600,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	12 Dokumen	3,600,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1,465,044	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Laporan	1,419,044	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	2,320,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	2,320,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	3,600,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	12 Laporan	3,600,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1,215,044	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	1,215,044	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Sekretariat DPRD	17 Laporan		0 Laporan	17 Laporan	24,000,000						17 Laporan	24,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	3,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	3,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	3,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	3,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	3,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Laporan	3,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	6,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	12 Laporan	6,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	6,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Laporan	6,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	3,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	3,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	6,160,000						1 Dokumen	6,160,000	
4 02 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	6,160,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	6,160,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum Sekretariat DPRD selesai	12 Laporan		0 Laporan	142 Laporan	3,095,453,605						142 Laporan	3,250,498,920	
4 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	29,461,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Paket	27,833,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	239,512,755	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	4 Paket	230,873,470	Sekretariat DPRD

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	182,796,850	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	3 Paket	254,178,600	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	354,219,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	2 Paket	343,308,850	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	62,160,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	2 Dokumen	58,335,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				130 Laporan	2,227,304,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	130 Laporan	2,335,970,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah pada Sekretariat DPRD selesai	6 Laporan		0 Laporan	3 Laporan	315,500,000						3 Laporan	280,000,000	
4 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	315,500,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	25 Unit	280,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Sekretariat DPRD selesai	9 Laporan		0 Laporan	123 Laporan	1,852,424,494						123 Laporan	1,813,169,119	
4 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				60 Laporan	16,200,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	60 Laporan	16,200,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				25 Laporan	331,800,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	25 Laporan	337,800,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				38 Laporan	1,504,424,494	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	38 Laporan	1,459,169,119	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah pada Sekretariat DPRD selesai	7 Laporan		0 Laporan	39 Laporan	1,832,179,422						39 Laporan	1,787,479,422	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	192,600,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	4 Unit	194,450,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	523,863,422	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	26 Unit	477,313,422	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				33 Unit	101,520,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	33 Unit	101,520,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1,014,196,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Unit	1,014,196,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD; Jumlah Orang yang mendapat pakaian dinas dan atribut serta yang mengikuti medical check up DPRD	40 Orang		0 Orang	40 Orang	21,335,196,000						40 Orang	21,335,196,000	
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				40 Orang/Bulan	21,124,646,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	40 Orang/Bulan	21,124,646,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				1 Paket	164,350,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Paket	164,350,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				40 Orang	46,200,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	40 Orang	46,200,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan, Fasilitasi Fraksi dan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD; Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	238 Laporan		0 Laporan	230 Laporan	1,139,945,694						230 Laporan	1,193,987,940	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi					5 Dokumen	683,125,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	5 Dokumen	711,250,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Pembahasan Panganggaran	8 Dokumen		0 Dokumen	8 Dokumen	3,365,530,000							8 Dokumen	3,588,842,246	
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	576,840,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Dokumen	595,660,000	Sekretariat DPRD	
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				2 Dokumen	561,840,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Dokumen	580,660,000	Sekretariat DPRD	
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	867,160,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	940,107,246	Sekretariat DPRD	
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	637,230,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	671,050,000	Sekretariat DPRD	
4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				1 Dokumen	8,650,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	8,650,000	Sekretariat DPRD	
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	713,810,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	792,715,000	Sekretariat DPRD	
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan; Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	214 Laporan		0 Laporan	52 Laporan	10,935,571,492							52 Laporan	11,223,841,492	
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				12 Laporan	1,606,792,873	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Laporan	1,644,125,373	Sekretariat DPRD	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 2.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				12 Laporan	1,480,992,873	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Laporan	1,514,945,373	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				12 Laporan	1,480,992,873	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Laporan	1,514,945,373	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				12 Laporan	1,480,992,873	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Laporan	1,514,945,373	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.03 06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	505,350,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	517,450,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.03 07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				2 Dokumen	3,911,490,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Dokumen	3,988,870,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.03 08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	468,960,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	528,560,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pendalaman Tugas DPRD; Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli serta Tenaga Ahli Fraksi; Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan serta dokumen fasilitasi hubungan masyarakat; Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	282 Dokumen		0 Dokumen	34 Dokumen	7,468,069,942						34 Dokumen	7,907,542,115	
4 02 02 2.04 02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				8 Dokumen	4,025,120,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	8 Dokumen	4,194,560,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				16 Dokumen	2,064,728,046	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	16 Dokumen	2,111,655,969	Sekretariat DPRD

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				2 Orang	216,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Orang	324,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				6 Orang	225,806,400	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	6 Orang	225,806,400	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				1 Dokumen	868,042,246	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	970,642,246	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				2 Dokumen	68,373,250	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Dokumen	80,877,500	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran dan Reses DPRD yang Disusun	6 Dokumen		0 Dokumen	6 Dokumen	7,024,778,973						6 Dokumen	7,059,167,723	
4 02 02 2.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				3 Dokumen	1,153,419,600	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Dokumen	1,179,794,600	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	5,871,359,373	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Dokumen	5,879,373,123	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Penyusunan Kode Etik, Tata Beracara dan Pengawasan DPRD	13 Laporan		0 Laporan	13 Laporan	843,990,000						13 Laporan	897,391,123	
4 02 02 2.06 01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	388,620,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	400,430,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.06 02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				12 Laporan	455,370,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Laporan	496,961,123	Sekretariat DPRD

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah; Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	4 Dokumen		0 Dokumen	5 Dokumen	678,280,000						5 Dokumen	865,060,000	
4 02 02 2.07 01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				4 Dokumen	672,480,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	4 Dokumen	859,260,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.07 02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				1 Dokumen	5,800,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	5,800,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD; Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah; Jumlah Laporan Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	172 Dokumen		0 Dokumen	15 Dokumen	5,350,973,369						15 Dokumen	6,015,993,369	
4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				1 Dokumen	614,520,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	1,138,980,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.08 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	10,540,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Laporan	10,540,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.08 03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	2,949,620,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Dokumen	3,043,890,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.08 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				1 Dokumen	1,776,293,369	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	1,822,583,369	Sekretariat DPRD
TOTAL							81,501,866,143							84,134,685,703	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2023 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Kerja DPRD yang dijabarkan dalam Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, indikator, target kinerja dan pagu anggaran, disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang direncanakan. Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2023 diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD sehingga dapat mendukung agenda kegiatan DPRD dengan baik dan lancar serta secara keseluruhan dapat mendukung keberhasilan pembangunan.

Program dan Kegiatan yang telah disusun dalam Renja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2023 nantinya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD tahun 2023.